

## KSAU Pimpin Upacara Sertijab Tiga Jabatan Strategis TNI AU

JAKARTA (IM) - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marssekal Fadjar Prasetyo memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tiga jabatan strategis TNI AU di Auditorium Mabesau, Cilangkap, Jakarta, Rabu (25/10).

Tiga jabatan strategis itu antara lain Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KSAU, Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI AU (Kadiskomleka), dan Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI AU (Kadisinfohataa).

Jabatan Asrena KSAU diserahkan Marsda Purwoko Aji Prabowo kepada Marsda Wayan Superman. Jabatan Kadiskomleka diserahkan Marsma Yos Alfantino kepada Marsma Penny Radjendra. Lalu, jabatan Kadisinfohataa diserahkan Marsma Teguh Dharmawan kepada

Marsma Bambang Ismiyadi.

"Sertijab ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penanggalan dan penyematn tanda jabatan, penandatanganan pakta integritas dan naskah berita acara sertijab," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma R Agung Sasongkojati dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/10).

Sertijab itu berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1127/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan jabatan di lingkungan TNI.

Upacara sertijab ini dihadiri antara lain Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau) Marsdy A Gustaf Brugman, para Asisten KSAU, para pejabat di jajaran Mabesau, Ketua Umum PIA Ardhy Garini Inong Fadjar Prasetyo, dan para pengurus PIA Ardhy Garini Pusat. ● mei

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



## PEMBUKAAN ISEF 2023

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) didampingi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kanan) meninjau pameran usai membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (26/10). BI menggelar ISEF 2023 yang diselenggarakan pada 25-29 Oktober 2023 dengan menampilkan produk-produk halal serta fesyen muslim untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

## Pendaftaran Ditutup, Kapan Penetapan Capres-Cawapres Pemilu 2024?

JAKARTA (IM) - Tiga bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Ketiganya yakni, bakal pasangan capres-cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian, bakal capres-cawapres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta bakal capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Masa pendaftaran peserta Pilpres 2024 yang berlangsung sejak 19 Oktober 2023 dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Lantas, apakah Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran, serta merta resmi menjadi capres-

cawapres peserta Pemilu 2024?

Setelah menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU, bakal capres-cawapres harus mengikuti serangkaian tahapan lainnya, salah satunya pemeriksaan kesehatan.

Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi dokumen bakal paslon. Bakal pasangan capres-cawapres juga diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen persyaratan jika ada yang perlu diperbaiki atau belum lengkap. Jika tahapan-tahapan tersebut sudah tuntas, barulah KPU menetapkan bakal pasangan calon menjadi capres-cawapres peserta Pemilu 2024.

Selanjutnya, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon. Tahapan Pilpres 2024 telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. ● han

## Dirut Pertamina Irit Bicara Usai Diperiksa KPK Soal Korupsi LNG

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Jakarta Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (26/10).

Nicke Widyawati diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina. Nicke ke luar dari gedung KPK pada pukul 15.19 WIB. Saat ditanya para wartawan, Nicke pun irit bicara dan langsung bergegas meninggalkan gedung KPK.

"Alhamdulillah (pemeriksaan) lancar, Alhamdulillah ya. Sehat-sehat semuanya," ujar Nicke sambil meninggalkan gedung KPK.

Nicke tidak menanggapi pertanyaan wartawan terkait berapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Dirinya juga tidak merespons ketika ditanya materi pemeriksaan hari ini.

Sebelumnya Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Kamis (26/10). Nicke diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi terkait pengadaan LNG di PT PTMN

pada 2011-2021. Kasus ini menjerat mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, sebagai tersangka.

"Penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT PTMN (Pertamina) tahun 2011-2021 dengan Tersangka GKK (Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan)," tambahnya.

Selain Nicke, KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya, yaitu Asisten ahli UKP-PKP, Agung Wicaksono, dan Pegawai SKK Migas, Rayendra Sidik.

Ketua KPK Firlil Bahuri sebelumnya mengatakan, kasus ini diawali dari rencana pengadaan LNG yang dilakukan oleh Pertamina pada 2012. Wacana tersebut dipilih kala itu sebagai upaya mengatasi defisit gas di Indonesia.

Mantan Dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan, lalu menjalin kerja sama dengan sejumlah produsen dan supplier LNG yang berada di luar negeri. Salah satu perusahaan yang ditunjuk ialah Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat.

Penjualan kerja sama dengan CCL tersebut dinilai bermasalah. KPK menduga keputusan yang diambil Karen saat itu sepihak tanpa ada kajian yang utuh.

Kebijakan yang diambil Karen itu kemudian mengakibatkan kerugian negara. Kerugian itu berupa LNG yang telah dibeli dari CCL LLC Amerika Serikat tidak terserap di pasar domestik hingga menjadi oversupply. Kasus ini menyebabkan kerugian negara Rp 2,1 triliun. ● han

**PENGUMUMAN**  
Diberitahukan bahwa RUPS Luar Biasa Pemegang Saham PT PERTAMA INDO JASA, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, memutuskan untuk membubarkan Perseroan tersebut yang diikuti dengan LIKUIDASI, sesuai Akta No. 05, tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan ANRISA WIJAYA, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang.  
Untuk itu kepada pihak yang berkepentingan dimohon agar segera menghubungi Tim Likuidasi paling lambat 60 hari sejak pengumuman ini terbit.  
Tangerang Selatan, 27 Oktober 2023  
(Tim Likuidator)

**PENGUMUMAN**  
Guna memenuhi ketentuan Pasal 133 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT DIGITAL TUNAI KITA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), mengumumkan telah menerima pengembalian oleh SILVER BOLT PTE. LTD., dan karenanya sebagian besar saham Perseroan saat ini telah beralih dan menjadi milik SILVER BOLT PTE. LTD. Pengembalian tersebut telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-017774 tanggal 25 Oktober 2023.  
Jakarta, 27 Oktober 2023  
Direksi PT DIGITAL TUNAI KITA  
di JAKARTA SELATAN

# MKMK Diminta Putuskan soal Pelanggaran Etik Anwar Usman dkk Sebelum 8 November 2023

Denny Indrayana meminta putusan MKMK batalkan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023, jika terbukti hakim konstitusi melanggar etik dan pedoman perilaku hakim.

JAKARTA (IM) - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) supaya memutus soal dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi sebelum 8 November 2023.

Jika putusan etik diktetok sebelum 8 November 2023 dan membatalkan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres, maka masih ada waktu perbaikan nama pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Seperti diketahui, Sebab, masih ada tahap pengantian nama sesuai tahapan pencalonan pilpres yang diatur KPU lewat Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Palsunya, bakal capres-cawapres yang belum berusia 40 tahun jadi tak memenuhi syarat maju di pilpres, sebagaimana ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut sebelum adanya putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". "Saya baru saja membuka jadwal (pendaftaran bakal capres-cawapres), dan jadwal terkait pemeriksaan etik ini adalah pengusulan bakal pasangan calon (presiden) pengantian di KPU. Tahapannya itu, Yang Mulia, kalau menurut jadwal yang kami baca, adalah 26 Oktober sampai dengan 8 November 2023," kata Denny dalam sidang perdana MKMK, Kamis (26/10).

## Setelah Ajudan Ditarik Bareskrim, Firlil dan KPK Kini Dikawal Puspom TNI

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dukungan pengamanan dari Puspom TNI pasca ditariknya kembali ajudan Firlil Bahuri ke Bareskrim Polri.

"Benar, bahwa ajudan Ketua KPK sudah ditarik kembali ke Polri sebagai instansi asalnya tentu untuk melanjutkan atau melaksanakan tugas lainnya," kata Ali Fikri kepada wartawan yang dikutip Kamis (26/10).

"Kemudian untuk kebutuhan tersebut, sekaligus pengamanan di lingkungan kantor, saat ini KPK mendapat dukungan tambahan dari Puspom TNI," kata Ali.

"Karena sifat laporannya agak sedikit beda dengan yang lain, misalnya, saya baca itu, mempersoalkan juga mengenai keabsahan putusan dan dengan kemungkinan putusan dibatalkan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman," ujarnya lagi.

Denny berharap MKMK bisa mempercepat pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pendeknya waktu. Dalam laporannya, Denny meminta agar putusan MKMK dapat membatalkan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023, seandainya terbukti hakim konstitusi melanggar etik dan pedoman perilaku hakim.

Menurutnya, putusan itu layak dibatalkan karena cacat etik dalam proses penyusunannya, berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman.

Sementara itu, dalam sidang yang sama, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie memberi isyarat bakal mempertimbangkan argumen Denny Indrayana Jimly bahkan menantang kesiapan Denny terbang ke Jakarta untuk mempercepat pemeriksaan perkara ini.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun menyanggahnya. "Yang diminta Pak Denny harus diterima, apa boleh buat, akan kami rapatkan bagaimana way out-nya untuk misalnya yang (laporan dari) rombongan Pak Denny atau Integrity Law Office ini apakah didahulukan," kata Jimly.

Sebelumnya, Kevin Egananta, ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri mengaku telah dipindahtugaskan ke Bareskrim Mabes Polri.

Hal tersebut diungkap Kevin saat ditanya apakah dirinya turut diperiksa bersama Firlil Bahuri di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri atau tidak.

"(Saya) udah dinas di Bareskrim," kata Kevin kepada wartawan, Selasa (24/10). Namun, Kevin enggan menjelaskan lebih detail sejak kapan ia ditarik dan bertugas di Bareskrim Mabes Polri. "Udah, udah. Saya ditarik di Bareskrim," katanya. ● han

Sebelumnya, Kevin Egananta, ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri mengaku telah dipindahtugaskan ke Bareskrim Mabes Polri.

Hal tersebut diungkap Kevin saat ditanya apakah dirinya turut diperiksa bersama Firlil Bahuri di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri atau tidak.

"(Saya) udah dinas di Bareskrim," kata Kevin kepada wartawan, Selasa (24/10). Namun, Kevin enggan menjelaskan lebih detail sejak kapan ia ditarik dan bertugas di Bareskrim Mabes Polri. "Udah, udah. Saya ditarik di Bareskrim," katanya. ● han



**Pemeriksaan Kesehatan Prabowo - Gibran**  
Bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (tengah) didampingi istri Selvi Ananda (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (26/10). Pemeriksaan kesehatan tersebut sebagai syarat pendaftaran dalam Pilpres 2024.

calon di Pilpres 2024, dan waktu terakhir untuk mengajukan pengantiannya adalah 8 November, 10 hari kerja dari sekarang," katanya lagi.

Denny berharap MKMK bisa mempercepat pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pendeknya waktu. Dalam laporannya, Denny meminta agar putusan MKMK dapat membatalkan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023, seandainya terbukti hakim konstitusi melanggar etik dan pedoman perilaku hakim.

Menurutnya, putusan itu layak dibatalkan karena cacat etik dalam proses penyusunannya, berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman.

Sementara itu, dalam sidang yang sama, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie memberi isyarat bakal mempertimbangkan argumen Denny Indrayana Jimly bahkan menantang kesiapan Denny terbang ke Jakarta untuk mempercepat pemeriksaan perkara ini.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun menyanggahnya. "Yang diminta Pak Denny harus diterima, apa boleh buat, akan kami rapatkan bagaimana way out-nya untuk misalnya yang (laporan dari) rombongan Pak Denny atau Integrity Law Office ini apakah didahulukan," kata Jimly.

Sebelumnya, Kevin Egananta, ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri mengaku telah dipindahtugaskan ke Bareskrim Mabes Polri.

Hal tersebut diungkap Kevin saat ditanya apakah dirinya turut diperiksa bersama Firlil Bahuri di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri atau tidak.

"(Saya) udah dinas di Bareskrim," kata Kevin kepada wartawan, Selasa (24/10). Namun, Kevin enggan menjelaskan lebih detail sejak kapan ia ditarik dan bertugas di Bareskrim Mabes Polri. "Udah, udah. Saya ditarik di Bareskrim," katanya. ● han

Sebelumnya, Kevin Egananta, ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri mengaku telah dipindahtugaskan ke Bareskrim Mabes Polri.

Hal tersebut diungkap Kevin saat ditanya apakah dirinya turut diperiksa bersama Firlil Bahuri di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri atau tidak.

"(Saya) udah dinas di Bareskrim," kata Kevin kepada wartawan, Selasa (24/10). Namun, Kevin enggan menjelaskan lebih detail sejak kapan ia ditarik dan bertugas di Bareskrim Mabes Polri. "Udah, udah. Saya ditarik di Bareskrim," katanya. ● han

Sebelumnya, Kevin Egananta, ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri mengaku telah dipindahtugaskan ke Bareskrim Mabes Polri.

Hal tersebut diungkap Kevin saat ditanya apakah dirinya turut diperiksa bersama Firlil Bahuri di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri atau tidak.

"(Saya) udah dinas di Bareskrim," kata Kevin kepada wartawan, Selasa (24/10). Namun, Kevin enggan menjelaskan lebih detail sejak kapan ia ditarik dan bertugas di Bareskrim Mabes Polri. "Udah, udah. Saya ditarik di Bareskrim," katanya. ● han

Sebelumnya, Kevin Egananta, ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri mengaku telah dipindahtugaskan ke Bareskrim Mabes Polri.

Hal tersebut diungkap Kevin saat ditanya apakah dirinya turut diperiksa bersama Firlil Bahuri di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri atau tidak.

capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandanginya hampir tiga tahun. Gibran pun secara akklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu (22/10).

Pasangan Prabowo-Gibran telah mendaftar sebagai peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2023 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (25/10). ● han

## Jimly Asshiddiqie: Saya Tidak Tega Melihat Reputasi MK Coreng Moreng

JAKARTA (IM) - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku tidak tega melihat MK yang didirikannya itu reputasinya kini coreng-moreng karena situasi politik.

Jimly mengungkapkan bahwa semula ia tak bersedia didapuk sebagai anggota MKMK karena khawatir terlibat konflik kepentingan, sehubungan dengan jabatannya selaku senator perwakilan DKI Jakarta di DPD RI.

Namun, ia mengaku diyakinkan bahwa konflik kepentingan itu tidak akan terjadi karena Jimly tidak mencalonkan diri lagi pada 2024, sehingga tidak mungkin menjadi pihak yang berperkar dalam perselisihan hasil pemilu yang kelak diadili MK.

"Apalagi saya punya beban sejarah, belum pernah MK terpuruk image-nya kayak sekarang. Saya sebagai pendiri tidak tega. Maka saya bersedia ini," kata Jimly dalam sidang perdana MKMK beragendakan klarifikasi para pelapor dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres, Kamis (26/10).

Ia menyindir MK yang dianggapnya dalam titik nadir sepanjang hayat lembaga tersebut. Jimly bahkan menyebut kasus yang akan diusutnya ini sebagai sejarah yang belum pernah terjadi di dunia.

"Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia di seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini," ucap Jimly.

Politik hari ini dianggapnya sudah tak lagi berpihak pada akal sehat akibat neo-liberalisme.

"Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk kekayaan, uang. Akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi terancam oleh dua iblis kekuasaan kekayaan," ujar Jimly.

"Maka MKMK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan akal sehat itu. Itu menuntun ke arah kemajuan

capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandanginya hampir tiga tahun. Gibran pun secara akklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu (22/10).

Pasangan Prabowo-Gibran telah mendaftar sebagai peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2023 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (25/10). ● han

## Jimly Asshiddiqie: Saya Tidak Tega Melihat Reputasi MK Coreng Moreng

JAKARTA (IM) - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku tidak tega melihat MK yang didirikannya itu reputasinya kini coreng-moreng karena situasi politik.

Jimly mengungkapkan bahwa semula ia tak bersedia didapuk sebagai anggota MKMK karena khawatir terlibat konflik kepentingan, sehubungan dengan jabatannya selaku senator perwakilan DKI Jakarta di DPD RI.

Namun, ia mengaku diyakinkan bahwa konflik kepentingan itu tidak akan terjadi karena Jimly tidak mencalonkan diri lagi pada 2024, sehingga tidak mungkin menjadi pihak yang berperkar dalam perselisihan hasil pemilu yang kelak diadili MK.

"Apalagi saya punya beban sejarah, belum pernah MK terpuruk image-nya kayak sekarang. Saya sebagai pendiri tidak tega. Maka saya bersedia ini," kata Jimly dalam sidang perdana MKMK beragendakan klarifikasi para pelapor dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia capres-cawapres, Kamis (26/10).

Ia menyindir MK yang dianggapnya dalam titik nadir sepanjang hayat lembaga tersebut. Jimly bahkan menyebut kasus yang akan diusutnya ini sebagai sejarah yang belum pernah terjadi di dunia.

"Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia di seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini," ucap Jimly.

Politik hari ini dianggapnya sudah tak lagi berpihak pada akal sehat akibat neo-liberalisme.

"Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk kekayaan, uang. Akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi terancam oleh dua iblis kekuasaan kekayaan," ujar Jimly.

"Maka MKMK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan akal sehat itu. Itu menuntun ke arah kemajuan

capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun.

Putusan ini memberi tiket untuk putra sulung Jokowi yang juga keponakan Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024 dalam usia 36 tahun berbekal status Wali Kota Solo yang baru disandanginya hampir tiga tahun. Gibran pun secara akklamasi disepakati Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto sejak Minggu (22/10).

Pasangan Prabowo-Gibran telah mendaftar sebagai peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2023 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (25/10). ● han